

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Skripsi ini berjudul : **“PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR”**. Untuk menghindari salah pemahaman terhadap judul tersebut dan untuk memperjelas arah penelitian, maka perlu penyusun tegaskan istilah fungsional yang terdapat dalam judul yang meliputi :

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau perilaku individu yang penting bagi struktur sosial².

Adapun yang penulis maksudkan dengan peran dalam skripsi ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ LPM dalam masyarakat sebagai organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Banjarejo.

¹ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hal. 667.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbitan UI, 1997), hal. 147.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat didirikan atas instruksi Bupati Lamongan dalam keputusan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan disesuaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa³.

3. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yaitu rasa aman, makmur. Kesejahteraan difahami sebagai keadaan yang aman, makmur, dan sentosa, selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, hambatan, dan kekacauan.

Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera dalam serbaneka keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis merupakan perpaduan dua kutub yang berbeda secara ekstrim namun seirama dalam gerak yaitu : jasmani – rohani, individu – sosial, dunia – akhirat, individu – biofisik, materiil – spiritual dan pribadi – nasional atau negara⁴.

³ Materi Pembekalan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2002, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan, (tidak diterbitkan, 1999), hal. 10.

⁴ Sudarwan Darim, *Transformasi SDM Analisis Fungsi Pendidikan Dinamika Perilaku dan Kesejahteraan manusia Indonesia Masa Depan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hal. 33.

Adapun yang penulis maksud dengan kesejahteraan masyarakat dalam skripsi ini adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual disertai rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang akhirnya mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya.

4. Desa Banjarejo

Desa Banjarejo adalah termasuk desa miskin yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil beternak. Desa ini terletak di sebelah utara Kabupaten Gresik dan sebelah selatan Kabupaten Lamongan. Penduduk desa ini berjumlah 2950 jiwa dan 650 KK.

Dari penegasan istilah tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa maksud judul skripsi ini adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh LPM sebagai organisasi desa dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual untuk mengentaskan/ menanggulangi kemiskinan melalui LPM sebagai motivator dan dinamisator.

B. Latar belakang masalah

Momentum pembangunan di Indonesia dewasa ini menempatkan usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat ekonomi lemah sebagai gerakan yang menjadi fokus perhatian bangsa. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 25,9 juta (14 %) penduduk yang masih berada di

bawah garis kemiskinan⁵, pemerintah mengupayakan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di seluruh Indonesia. Di samping itu pemerintah juga memberikan dorongan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Organisasi kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada gerakan kebersamaan. Semangat hidup gotong-royong dalam bermasyarakat pada bangsa Indonesia menjadi gerakan penting pada gerakan itu. Demikian juga ajaran agama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak menganjurkan tentang pentingnya memberi perhatian pada anggota masyarakat. Rasulullah saw telah bersabda sebagaimana dikutip oleh 'Allamah:

Manusia yang terbaik adalah yang paling berguna bagi masyarakat." Beliau juga bersabda: "*Pada hari kiamat, manusia yang menduduki tempat tertinggi di sisi Allah adalah orang yang paling banyak memajukan kesejahteraan hamba-hamba Allah.*"⁶

Semangat itu yang menjadi etos hidup bermasyarakat tersebut menjadi modal bagi gerakan organisasi kemasyarakatan untuk mengadakan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gerakan pengentasan kemiskinan adalah gerakan pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk

⁵ Mubyarto, *IDT : Program Pembangunan Bukan Proyek Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*, (Yogyakarta : P3PK UGM, 1995), Hal. 12.

⁶ 'Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, Penerjemah: Ahsin Mohammad, (Jakarta : Pustaka Hidayah), hal. 176.

mencapai keberhasilan maka gerakan ini harus melibatkan seluruh unsur yang ada dalam masyarakat tersebut. Salah satu model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat yang mudah diterapkan adalah model *Social Planning* atau Perencanaan Sosial⁷, yaitu model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat yang bersifat sektoral. Bersifat sektoral hanya mengembangkan jenis kehidupan tertentu saja, misalnya kehidupan ekonomi. Bersifat parsial karena yang dikembangkan hanya sebagian masyarakat saja yaitu masyarakat ekonomi lemah.

Dalam pelaksanaan, kegiatan Perencanaan Sosial memerlukan adanya tiga faktor utama yaitu pelaksana, sifat pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan.

Faktor pelaksana adalah untuk melaksanakan kegiatan perencanaan sosial diperlukan adanya tiga pihak pelaksana yang berperan secara terpisah tetapi saling berkaitan. Mereka adalah pihak motivator, dinamisator, penyandang dana ,dan pelaku gerakan. Motivator, dinamisator, dan penyandang dana adalah pihak luar yang berperan penting terhadap adanya gerakan, yaitu pihak yang merencanakan, mendorong dan membiayai gerakan. Sedang pelaku gerakan adalah kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat.

Sifat pelaksanaan kegiatan Perencanaan Sosial. Agar usaha pemberdayaan masyarakat mampu mengubah keadaan ekonomi masyarakat

⁷ Susilaningsih "Dinamika Kelompok Keagamaan Sebagai Pendorong Usaha Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga", Jurnal Penelitian Agama, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hal.23.

maka Perencanaan Sosial harus bersifat kesinambungan (*sustainable*). Untuk itu ada tiga prinsip yang harus diperhatikan yaitu, (1) adanya program menuju pada konsep menolong diri sendiri (2) pelaku Perencanaan Sosial harus orang dari dalam, (3) bertujuan kepada kemandirian.

Keberhasilan dari usaha pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dengan model Perencanaan Sosial didukung oleh dinamika kelompok masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dinamika kelompok itu akan dapat dilihat pada gejala-gejala berikut yaitu seluruh aktivitas anggota kelompok dalam melaksanakan program yang telah tersusun, sikap kelompok yang ada, kesadaran dan semangat kelompok dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pembangunan di Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh di semua bidang, baik material maupun spiritual yang semua bertujuan menuju masyarakat yang adil makmur. Semua tujuan itu akan tercapai apabila masyarakat dan negara berada pada taraf sejahtera.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk miskin tersebut adalah melalui usaha-usaha produktif yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga di masa mendatang masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang layak. Pendidikan dan kesehatan sekaligus merupakan program pemerintah dan gerakan masyarakat. Bila selama 25 tahun PJP I kegiatan-kegiatan pembangunan pedesaan lebih berciri sebagai program pemerintah bahkan proyek-proyek pemerintah, maka

program ini hanya pada tahap awal saja. Program ini selanjutnya harus dapat berkembang menjadi gerakan masyarakat dan gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Pada tahap awal pemerintah pusat maupun daerah menggerakkan program-programnya, tetapi bobotnya sebagai upaya pemberdayaan (*empowering*) masyarakat makin lama harus makin kuat, dimana partisipasi langsung masyarakat harus makin menonjol⁸.

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil mutu-mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Untuk itu semua secara kontinyu ditingkatkan. Usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi serta rehabilitasi tanah-tanah kritis.

Sementara itu pembangunan pedesaan harus pula merupakan usaha terpadu dan saling menunjang dengan pembangunan sektor-sektor pertanian dan pembangunan daerah. Untuk mengembangkan ekonomi pedesaan ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan, perlu ditingkatkan usaha memperbaiki penghasilan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, petani penggarap, petani berlahan sempit, peternak kecil dan lain-lain. Kebijaksanaan yang memberi kesempatan lebih besar kepada usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan seperti usaha kecil, sektor informal, dan tradisional, untuk meningkatkan usahanya perlu dilanjutkan dengan memberikan kepastian usaha, memperkuat modal, serta upaya memperoleh

⁸ Mubyarto, dkk, *op. cit.*, hal. 39.

"Bapak angkat" sesuai dengan profesi usaha. Upaya ke arah pengenalan sektor-sektor strategis sesuai dengan potensi wilayah desa merupakan peluang kerja dan berusaha masyarakat guna mengembangkan ekonomi pedesaan⁹.

Salah satu keterpaduan yang mutlak perlu diusahakan adalah keterpaduan antara pembangunan desa dan pembangunan pertanian. Dengan pembangunan desa dimaksudkan pembangunan yang dilaksanakan di desa, yang berlandaskan kepada potensi wilayah seperti SDM dan SDA setempat, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.¹⁰.

Implementasi dari pembahasan di atas dapat dilihat pada kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Banjarejo sebagai perencana dan pelaksana pembangunan. LPM adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengatur dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pedesaan dengan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa¹¹.

⁹ Mubyarto, dkk, *Membahas Pembangunan Desa*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hal. 37-38.

¹⁰ *Ibid*, hal. 39.

¹¹ Materi Pembekalan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2002, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan, (tidak diterbitkan, 1999), hal. 10.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada aspek kesejahteraan masyarakat melalui peran LPM maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi masyarakat desa Banjarejo?
2. Apa peran LPM dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa Banjarejo sebagai motivator dan dinamisator?

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi masyarakat desa Banjarejo
2. Untuk mengetahui peran LPM dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa Banjarejo sebagai motivator dan dinamisator

E. Kegunaan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka hasil penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritik yaitu dapat digunakan sebagai informasi atau kontribusi baru bagi pengembangan penelitian di bidang pengembangan masyarakat.
2. Kegunaan praktis yaitu sebagai bahan pertimbangan terhadap upaya dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa oleh LPM desa Banjarejo.

F. Kerangka teoritik

1. Kesejahteraan masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat di sini adalah keadaan suatu komunitas sosial yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Sebuah masyarakat yang penuh dengan nuansa keberadaban, keterbukaan, dan kedemokratisan. Masyarakat yang sejahtera tidaklah dimaksudkan semata-mata sejahtera secara materi – seperti kecukupan pangan, sandang, dan papan – tetapi juga sejahtera secara spiritual – seperti menikmati rasa keberagamaan, kependidikan, keamanan, keadilan, keberbudayaan, kerumahtanggaan, dan sebagainya – yang menjadi kompetensi dari ketersediaan agama dalam mengabdikan seluruh paradigma seruan dan ajakannya.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, dan masa depan yang tidak menentu. Kesejahteraan yang dituntut oleh agama adalah kesejahteraan berkesimbangan secara proporsional antara kesejahteraan jasmani dan rohani. Pola keseimbangan yang menjadi tuntunan agama adalah keselarasan hubungan manusia dengan manusia, keselarasan hubungan manusia dengan alam, dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan. Kedudukan manusia dalam sistem keseimbangan bersifat sentral (*man centered*), berharkat

dan bermartabat tinggi serta memberikan kesejahteraan kepada manusia secara menyeluruh.¹²

Manusia yang sejahtera sebagaimana digambarkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 adalah manusia yang memiliki tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik materiil maupun spiritual disertai rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang akhirnya mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya.¹³

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan dan keberadaannya dibutuhkan, serta merupakan bagian integral dari seluruh tatanan kehidupan atau keanekaragaman hayati secara fisiologik prilaku manusia sama dengan prilaku hewan: lapar, seks, kepanasan, kedinginan, haus, dan kapasitas mempertahankan diri. Perbedaannya pada dimensi sosial dan keanekaragaman serta jenjang kebutuhan sebagai insan berbudaya yang mengandung unsur rasa, cipta karsa.

Terpenuhi kebutuhan manusia, menurut Islam, sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, sementara mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada semua ummat manusia sepanjang ruang dan waktu, Allah SWT juga telah menganugerahkan sumber daya alam

¹² Nurchalish Madjid et. al. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta : Mediacita, 2000), hal. 417.

¹³ Sudarwan Darim, *Op. Cit*, hal. 7.

kepada manusia untuk kesejahteraannya. Firman Allah SWT, "Dia yang telah menciptakan untukmu segala sesuatu di atas bumi". (Q.s. 2 : 29), "dan telah membuat tunduk kepadamu semua yang ada di langit dan bumi dan menganugerahkan kepadamu kekayaan-Nya baik yang terlihat maupun yang tersembunyi". (Q.s. 31 : 20). Dua prinsip utama mungkin diambil dari ayat-ayat tadi. Pertama, sumber daya yang diberikan "kepadamu" adalah dari Allah SWT yang berarti dialamatkan kepada seluruh umat manusia, bukan sekelompok elite/kelas istimewa tertentu. Kedua hal itu berarti untuk kesejahteraan manusia secara umum. Setidak-tidaknya untuk membasmi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat¹⁴.

Begitu juga tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat pasal 1 UU No.6 Th. 1974 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan masyarakat atau sosial¹⁵.

b. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Manusia Indonesia masa depan yang kita inginkan adalah manusia-manusia yang memenuhi standar ekonomi, kesehatan,

¹⁴ M.Umer Chapia, dkk, *Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal.31.

¹⁵ <http://www.transparansi.or.id/kajian/ka-sosial-01.html>. *Kesejahteraan Sosial* 5 April 2004.

perbaikan gizi, pendidikan, merupakan kesatupaduan yang perlu mendapat perhatian.

Pasal 33 UUD 1945, selalu ditekankan bahwa pasal ini berisi politik perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan kesejahteraan tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan material atau kebutuhan dasar.

Upaya negara menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui empat cara yaitu :

1. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Penguasaan bumi air dan kekayaan yang ada di dalamnya.
3. Pemiliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar.
4. Penyediaan lapangan kerja¹⁶.

Upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses belajar dan pencerahan masyarakat desa yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabatnya lewat

¹⁶ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hal. 15.

kegiatan emansipasi dan pencerahan sosial yang terencana, terarah, terkendali secara berkelanjutan¹⁷.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat-pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, dan budaya dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁸.

Pemberdayaan masyarakat desa meliputi 2 unsur yaitu: ikut sertanya penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain. Bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka untuk berusaha sendiri dan saling membantu.

Pemberdayaan masyarakat desa mencakup tiga dimensi, yaitu:

- 1). Berupaya membebaskan dan menyadarkan masyarakat.

Kegiatan ini bersifat subyektif dan memihak kepada masyarakat yang tertindas ('dhuafa') dalam rangka memfasilitasi mereka dalam proses penyadaran sehingga

¹⁷ Harnomo, Dalam Kumpulan Makalah, *Penciptaan Keadilan Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan*, (tidak diterbitkan), hal. 56.

¹⁸ Irawan, Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, (Yogyakarta : BPFE), hal. 308.

memungkinkan lahirnya upaya untuk pembebasan dari kemiskinan dan keterbelakangan.

- 2). Berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi.
- 3). Menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya¹⁹.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'ad :

11 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مُرْدَلَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْ (الرعد : ١١)

Artinya; Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali -sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Ar-Ra'ad : 11)²⁰.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa merupakan upaya penggerahan sumber daya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat desa. Ini

¹⁹ M. Yakub, *Pondok Pesantren dan pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung : Angkasa, 1985), hal. 25.

²⁰ *Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI 1985, hal. 243.

akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sektor masyarakat desa dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah (peningkatan pendapat) yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus meliputi empat upaya besar dan merupakan strategi pokok pembangunan ekonomi desa, antara lain:

- a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa
- b. Dalam jangka lebih panjang meningkatkan kualitas SDM desa.
- c. Pembangunan prasarana. Prasarana perhubungan teramat penting karena sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat serta barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkannya sendiri.
- d. Pembangunan kelembagaan desa. Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa perlu diperkuat agar pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri²¹.

²¹ Ginandjar Kertasasmita, *Pemberdayaan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CIDES, 1996), hal. 394.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian dan landasan hukum LPM

Lembaga Pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat tingkat desa yang berada di desa Banjarejo dan merupakan organisasi desa yang menaruh perhatian pada urusan umum yang ditentukan kelompok sosial, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Organisasi yang tidak berafiliasi pada lembaga-lembaga politik, dan bekerja untuk membantu, mengembangkan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 2) Organisasi yang sangat menaruh perhatian terhadap kemiskinan, ketertekanan, dan keterpinggiran masyarakat, sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup.
- 3) LPM didirikan oleh dan untuk masyarakat.
- 4) Organisasi desa yang luwes dan demokratis dalam pengaturan dan berusaha untuk melayani masyarakat tanpa keuntungan diri sendiri.

Landasan hukum pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan adalah:

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- c) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- f) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat seKabupaten Lamongan;
- g) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Lembaga Kemasyarakatan Desa²².

b. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan sandang-pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan.

Beberapa hal berikut ini adalah peran LPM sebagai motivator dan dinamisator merupakan upaya meningkatkan tata kehidupan

²² Materi Pembekalan Aparat Pemerintah Desa, *op.cit*, hal. 11.

materiel dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa, yaitu: investasi pelayanan masyarakat dalam bidang infra struktur sosial, seperti jalan, sumber air bersih, irigasi, sekolah, dan klinik kesehatan. Jalan-jalan hendaknya merupakan jalan yang dihubungkan ke kota yang menyediakan berbagai pelayanan. Sedangkan sekolah, klinik, sumber air bersih, dan irigasi hendaknya dipelihara oleh pemerintah dan masyarakat baik dari segi pendanaan maupun kegiatan. Tujuannya agar masyarakat ikut memiliki²³.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan material dan spiritual individu maupun masyarakat tersebut mengharuskan LPM berkewajiban untuk meningkatkan tata kehidupan materiel dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa melalui program LPM yang mempunyai tiga misi, yaitu sebagai gerakan masyarakat maupun gerakan nasional, sebagai strategi pemerataan pembangunan dan sekaligus bertujuan menggerakkan roda ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja, pendampingan, dan pembangunan prasarana fisik, adalah upaya khusus yang dimaksudkan untuk menjangkau langsung penduduk pedesaan dan meningkatkan likuiditas perekonomiannya.

Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh LPM dengan pengajuan data keluarga miskin yang perlu mendapatkan bantuan

²³ M. Amin Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media , 1995), hal. 168.

melalui RT/RW yang bersangkutan dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) kecamatan tiap-tiap desa/ kelurahan. Data yang diterima kemudian dibicarakan dan diolah di Rakorbang Kabupaten/Kota Madya untuk selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi dan terakhir diajukan ke Bapenas. Data yang masuk ke Bapenas diseleksi untuk disesuaikan dengan anggaran yang disediakan APBN. Proses yang cukup panjang ini menghendaki efisiensi di setiap lini agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan²⁴.

Peran LPM diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2000 atas Instruksi Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2001 dan dibawa pembinaan Bupati Lamongan²⁵.

Secara terperinci peran yang dilakukan oleh LPM seperti yang dikelompokkan oleh Jim Ife yang meliputi empat hal :

- a) *Facilitative roles*, yakni peran-peran yang dijalankan oleh pekerja masyarakat dengan memberi stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran itu meliputi *social animation* (memberi semangat atau mengaktifkan), *mediation dan negotiation* (menengahi dan menghubungkan), *support* (mendorong), *building consensus* (membangun kesepakatan), *group facilitation* (memfasilitasi atau memperlancar kelompok), *utilization of skills*

²⁴ <http://www.transparansi.or.id/kajian/k-sosial-01.html>, 25 Maret 2004.

²⁵ Materi Pembekalan, *op. cit*, hal. 10.

and resources (penggunaan keterampilan dan sumber-sumber),

dan *organizing* (mengatur).

- b) *Educational roles*, yakni peran-peran pendidikan. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbarui keterampilan, cara berpikir, cara berinteraksi, cara mengatasi masalah dan sebagainya.
- c) *Representational roles* (peran-peran perwakilan). Peran ini dijalankan oleh pekerja kemasyarakatan dalam interaksinya dengan lembaga luar, atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Peran-peran ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, melakukan advokasi atau pembelaan masyarakat, membuat mitra atau network, sharing pengalaman dan pengetahuan dan menjadi jubir masyarakat.
- d) *Technical roles*, yakni peran pekerja masyarakat dalam mengembangkan masyarakat terdapat beberapa dimensi pekerja kemasyarakatan seperti pengumpulan data, penyajian secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan secara fisik²⁶.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan sebuah kelompok orang (masyarakat) yang hidup di daerah otonom tingkat terendah atau hidup di luar kota

²⁶ Jim Ife, *Community Development*, (Melbourne, Addison Werley Longman, 1997), hal. 201.

dalam jangka waktu yang lama, serta mempunyai hubungan yang erat antara keluarganya²⁷.

a. Kharakteristik masyarakat desa

Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di desa dapat dilihat dari beberapa kharakteristik yang mereka miliki, adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat beradat. Keeratan dan kepatuhan terhadap adat istiadat
- 2) Masyarakat berkerohanian. Masyarakat desa memiliki perhatian yang cukup terhadap masalah yang berhubungan dengan kerohanian²⁸.
- 3) Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.
- 4) Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.
- 5) Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya).
- 6) Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar atau banyak²⁹.

²⁷ Budi Riyanto, *Skripsi Problematika Dakwah Islamiyah Pada Masyarakat Desa di Desa Banjararum Kecamatan Lawang Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta* (tidak diterbitkan), 2001, hal.2.

²⁸ M. Suprihadi Sastrosupono, *Desa Kita*, (Bandung: Penerbit Alumni , 1984), hal.6

²⁹ Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal.

b. Kelemahan masyarakat desa

Kelemahan masyarakat adalah:

- 1). Adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani satu dengan yang lain. Hal ini karena sesama anggota komunitas dalam memenuhi kebutuhannya , merek harus memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sangat terbatas.
- 2). Terdapatnya pandangan yang sempit di kalangan masyarakat, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas.
- 3). Adanya ketergantungan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau unsur-unsur pemerintah.
- 4). Ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru.
- 5). Masyarakat desa memiliki wawasan rendah dalam menggapai atau merencanakan masa depan.
- 6). Adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk menggapai masa depan.
- 7). Kekurangan atau ketiadaan sifat untuk dapat menekan diri, yakni untuk mengorbankan kenikmatan sekarang, demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan.
- 8). Terdapat pandangan yang sempit terhadap dunia luar.

c. Potensi masyarakat desa

Potensi masyarakat desa dipengaruhi oleh strafikisai dalam kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial masyarakat desa itu terbagi menjadi tiga antara lain adalah:

- a) Strata atau lapisan atas. Lapisan ini diduduki oleh warga desa yang kaya. Mereka terdiri dari pemilik usaha tani yang besar, dokter, pengacara, dan lain-lain. Potensi masyarakat kelas atas cenderung dapat menjadi pemimpin masyarakat.
- b) Lapisan menengah. Lapisan ini diduduki oleh para guru sekolah di desa, pemilik lahan usaha tani dalam ukuran menengah. Potensi masyarakat ini pada umumnya dapat menjadi pimpinan formal dan pimpinan organisasi sosial dalam komunitasnya.
- c) Lapisan bawah. Lapisan ini diduduki oleh orang-orang yang bekerja sebagai buruh perusahaan atau pabrik industri desa, pelayan tokoh, orang yang bekerja tanpa memerlukan pendidikan tinggi dan bergaji sekadarnya, para buruh tenaga kasar, mereka yang berpenghasilan rendah. Potensi masyarakat seperti ini adalah cenderung tidak banyak aktif berpartisipasi dalam aktivitas social yang ada di desa. Dan mereka lebih banyak menjadi “pak dan mak *nurut*”³⁰.

³⁰ Bahrein Suceinen, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 150-151.

G. Metode penelitian

1. Subyek penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penelitian³¹.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah orang-orang yang berada dalam kepengurusan LPM Desa Banjarejo dan sekaligus sebagai informan. Informan ini dipilih dari orang yang benar-benar mengetahui bagaimana kondisi desanya.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah :

- a. Pendamping dan pengurus LPM Desa Banjarejo yang berkompeten dalam memahami dan mengaplikasikan usaha-usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat sasaran dan orang-orang yang secara tidak langsung terlibat dalam usaha meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa yang dikembangkan oleh LPM Desa Banjarejo.

2. Obyek penelitian

Yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah, data apa yang dicari dalam penelitian. Maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah : peran LPM Dalam Meningkatkan tata kehidupan materiil dan spiritual masyarakat desa Banjarejo.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 119.

3. Metode pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan metode-metode tertentu yang relevan. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah :

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang harus dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian³².

Yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah: seleksi individu untuk diwawancarai; pendekatan orang yang telah diseleksi untuk wawancara; pengembangan suasana lancar dalam wawancara serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai³³.

Dalam penelitian ini jenis interview yang dipakai adalah interview bebas terpimpin.

Interview bebas terpimpin adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer yang sudah dipersiapkan secara cermat dan lengkap, sedang cara penyampaian pertanyaan-pertanyaan ini dilakukan oleh interviewer dengan cara bebas³⁴.

³² Sutrisno Hadi, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1987), hal. 129.

³³ Koentjaraningrat, *Op.Cit*, hal. 163.

³⁴ Anas Sudijono, *Diktat Kuliah Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, (Yogyakarta: UD. Rama, 1981), hal. 30.

Sebagai pedoman dalam interview babas terpimpin ini yaitu guide yang telah dipersiapkan lebih dulu yaitu berupa cacatan pokok yang masih memungkinkan variasi penyajian pertanyaan-pertanyaan itu disesuaikan dengan situasi yang ada atau disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Pihak-pihak yang akan diwawancara sebisa mungkin dipilih yang menguasai permasalahan. Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada pendamping, para pengurus LPM Desa Banjarejo, tokoh masyarakat, masyarakat sasaran LPM, serta orang-orang yang berperan di dalam usaha meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat Desa Banjarejo.

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data mengenai usaha dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat yang dikembangkan oleh LPM Desa Banjarejo.

b. Observasi

Metode observasi mengandung arti “penyelidikan pengindraan kepada obyek dengan sengaja mengadakan pencatatan”³⁵.

Dalam penelitian penulis menggunakan metodoe “non partisipan” yang artinya penulis tidak mengambil bagian atau terlibat langsung dalam kegiatan LPM, melainkan hanya melakukan pencatatan saja.

³⁵ Suharsini Arikunto, *Op. Cit.*, hal. 128.

Metode observasi ini penulis gunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data, yakni untuk mengetahui dan menyelidiki secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan usaha dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa yang dilaksanakan oleh LPM Desa Banjarejo.

c. Dokumentasi

Menurut Winarno, metode dokumentasi adalah “suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara pencatatan dari monograf, manuskrip, dan melalui dokumentasi³⁶.

Dengan demikian metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa catatan dan arsip yang ada. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran mengenai gambaran umum tentang usaha dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa oleh LPM Desa Banjarejo yang belum didapat dalam metode lainnya.

4. Metode analisis data

Untuk mengelolah data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa³⁷.

³⁶ *Ibid*, hal. 209.

³⁷ Winarno Surakhmad, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Rarsito, 1987), hal. 140.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif disebut deskriptif karena bersifat menjelaskan, menerangkan atau menggambarkan suatu peristiwa sedangkan disebut kualitatif karena data yang dihasilkan dari penelitian ini tidak dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

H. Sistematika pembahasan

Sebagai awal dari skripsi ini masih merupakan sisi formalitas yang mesti diharapkan sebagai syarat keabsahan diterimanya skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah. Ini terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas, halaman penegasan, halaman motto, persembahan serta kata pengantar dan daftar isi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dan selanjutnya masuk pada wilayah skripsi yang menggambarkan pokok-pokok skripsi secara garis besar yang termuat dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I bersisi tentang pendahuluan yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum desa Banjarejo dan Lemabga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Gambaran umum masyarakat desa Banjarejo meliputi: kondisi geografis, penduduk, sosial ekonomi, sosial budaya terdiri dari pendidikan dan agama, sedangkan gambaran umum LPM meliputi: sejarah berdirinya dan perkembangan LPM, landasan idil dan

landasan operasional LPM, sumber dana LPM, tugas LPM, fungsi LPM, struktur organisasi LPM yang terdiri dari kedudukan, tugas dan masing-masing jabatan dan yang terakhir adalah tugas kerja kelompok LPM.

Bab III berisi inti penelitian tentang peran LPM dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan tata kehidupan spiritual masyarakat desa Banjarejo yang meliputi: kondisi masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, LPM sebagai motivator /dan dinamisator.

Bab IV berisi penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran ,dan penutup.

Sedangkan pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas semua data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, antara lain adalah:

1. Upaya LPM desa Banjarejo dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan spiritual masyarakat desa adalah dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yaitu dengan cara mengatur dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa melalui bentuk simpan pinjam dan memberikan bantuan sebagai usaha modal peternak kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian berupa tambak atau sawah. Peran LPM sebagai motivator dan dinamisator dalam meningkatkan tata kehidupan meteriil dan tata kehidupan spiritual masyarakat yang diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu:
 - a. Upaya secara non ekonomi yang terdiri dari penyuluhan, pembinaan baik secara formal dan non formal, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - b. Upaya secara fisik dan mengandung nilai ekonomis adalah terdiri dari normalisasi saluran irigasi, pembangunan jalan sebagai sarana transportasi, dan pembangunan gorong-gorong, pembangunan masjid sebagai sarana ibadah, pembangunan kantor balai desa, dan pembangunan Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat.

- c. Peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan keterampilan bagi remaja Karang Taruna, pemberdayaan wanita melalui kegiatan PKK, dan pembangunan gedung sekolah sebagai sarana pendidikan.
3. Tujuan peran LPM desa Banjarejo dalam meningkatkan tata kehidupan materiil dan spiritual masyarakat desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, motivator dan dinamisator adalah untuk memberdayakan masyarakat desa, mendorong, menggerakkan dan membina prakarsa serta untuk mengembangkan usaha swadaya gotong royong masyarakat desa didalam usahanya untuk membangun prasarana yang dibutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada bagian terakhir ini diperkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran. Saran tersebut antara lain adalah :

1. LPM desa Banjarejo hendaknya dalam rangka pengembangan usaha maka harus didukung oleh anggota yang terampil, sehingga SDM dan onggota perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam unit simpan pinjam prospeknya cukup baik sehingga perlu mencari teobosan-terobosan baru untuk mendapatkan dan meningkatkan modal baik berupa pinjaman maupun kerja sama dengan pihak yang saling menguntungkan.
2. Bagi masyarakat desa diharapkan untuk lebih ditingkatkan partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPM desa Banjarejo.

3. LPM desa Banjarejo hendaknya lebih meningkatkan dan mengembangkan program kerjanya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Banjarejo.
4. Bagi yang tertarik pada penelitian yang sama, umumnya pada bidang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagai variabel utamanya hendaknya dilengkapi dengan validitas data dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relevan, sehingga kajian dapat mendalam dan lebih komprehensif.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Illahi Rabbi, dengan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, kami sudah berusaha semaksimal mungkin ke arah syarat-syarat yang semestinya ada dalam penyusunan sebuah skripsi. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif akan penyusun terima dengan senang hati untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Sebagai kata akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniia-Nya terhadap usaha untuk meningkatkan dakwah Islam dan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar desa Banjarejo kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan Jawa Timur. Hanya kepada-Nya hamba menyembah dan memohon pertolongan. Amin Ya Rabba 'Alamin.



DAFTAR PUSTAKA

‘Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, Jakarta : Pustaka Hidayah.

Anas Sudijono, *Diktat Kuliah Metodologi Research dan Bimbingan Skripsi*, Yogyakarta: UD. Rama, 1981.

Bahrein Suceinen, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budi Riyanto, *Skripsi Problematika dakwah Islamiyah Pada Masyarakat Desa di Desa Banjararum Kecamtan Lawang Kabupaten Kulon Progo*, Yogyakarta tidak diterbitkan, 2001.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Semarang: CV. Toha Putra, 1985.

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

Ginandjar Kertasasmita, *Pemberdayaan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996.

Harnomo, Dalam Kumpulan Makalah, *Penciptaan Keadilan Melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan*, tidak diterbitkan.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Bayaan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1977), hlm. 682

Irawan, Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Edisi Keenam*, Yogyakarta : BPFE.

Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan Mencarai Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, Yogyakarta: Andi Offset.

Jim Ife, *Community Development*, Melborne, Addison Werley Longman, 1997.

Koentjoronginrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

M. Amin Rais, *Kemiskinan dan kesejangan di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media , 1995.

M. Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

M. Suprihadi Sastrosupono, *Desa Kita*, Bandung: Penerbit Alumni , 1984.

M. Yakub, *Pondok Pesantren dan pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung : Angkasa, 1985.

M.Umer Chapia, dkk, *Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Mubyarto, dkk, *Membahas Pembangunan Desa*, Yogyakarta : Aditya Media, 1996.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta : Aditya Media, 1996.

Mubyarto, *IDT : Program Pembangunan Bukan Proyek Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*, Yogyakarta : P3PK UGM, 1995.

Muh. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*, Himpunan Hadits Shahih yang disepakati oleh Bukhari-Muslim Jilid I, (terj.) Salim Bahresy, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Nurchalish Madjid et. al. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respond dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat madani*, Jakarta : Mediacita, 2000.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbitan UI, 1997.

Sudarwan Darim, *Transformasi SDM Analisisi Fungsi Pendidikan Dinamika Perilaku dan Kesejahteraan manusia Indonesia Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilaningsih "Dinamika Kelompok Keagamaan Sebagai Pendorong Usaha Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga", Jurnal Penelitian Agama, Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1987.

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Rarsito, 1985.

Buku Panduan LKMD daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan Jawa Timur (tidak diterbitkan)

Buku panduan PKK desa Banjarejo Tahun 2004

Dokumentasi LPM desa Banjarejo Tahun 2004

Materi Pembekalan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2002, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan, tidak diterbitkan.

Wawancara dengan ketua Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat Bp. A. Taklim

Wawancara dengan Bendahara LPM desa Banjarejo Bp. Yusuf

Wawancara dengan Kepala Desa Banjarejo Bp. Sarnadi

Wawancara dengan Wakil Ketua LPM Bp. Moh Ali

Wawancara dengan Ketua PKK Ibu Nisnarti

Wawancara dengan Ketua Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bp. Suwondo

Wawancara dengan Ketua Seksi Pemberdayaan Ibu Sumarti

Wawancara dengan Ketua Seksi Perekonomian dan Pembangunan Bp. H. Samsi

Wawancara dengan masyarakat desa Banjarejo Bp. Timan

Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Banjarejo Bp. Munaji

Wawancara dengan Sekretaris LPM desa Banjarejo Bp. Drs. Mas'ud

Wawancara Ketua Seksi Pendidikan LPM Bp. Monadi

http : //www.transparansi.or.id/kajian/ka-sosial-01.html. *Kesejahteraan Sosial 5*
April 2004

http://www.deliveri.org/guidelines/implementation/ig2/ig2_summary.htm, 10 juni
2004

http://www.transparansi.or.id/kajian/k-sosial-01.html, 25 Maret 2004